



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
3. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 31 Mei 2012
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : Membicarakan proses pengalihan program jaminan kesehatan terkait dengan operasional BPJS Kesehatan Tahun 2014.
Ketua Rapat : Dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 32 orang dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI, 8 orang izin.

I. PENDAHULUAN

setiap tahapan persiapan transformasi dan operasionalisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana amanat UU BPJS.

2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk menggunakan data yang akurat dan mempunyai legitimasi dari lembaga/badan negara terkait dalam persiapan beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk meningkatkan upaya sosialisasi, edukasi dan advokasi beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan pembentukan Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyiapkan dan melaksanakan *roadmap* pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan, termasuk penyebarannya, terkait persiapan operasional BPJS Kesehatan.
6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat dengan Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS Pemerintah sebelum Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 berakhir.

Rapat diakhiri pukul 16.45 WIB

Jakarta, 31 Mei 2012
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
WAKIL KETUA,

